

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena banyak memberi kontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional, baik dari segi unit usaha, penyerapan tenaga kerja, kontribusi terhadap produk domestik bruto, ekspor dan investasinya. Meningkatnya peranan ini dikarenakan UMKM lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi suatu lingkungan, dimana pasar berfungsi secara efektif dalam menyediakan berbagai jasa yang memungkinkan pertumbuhan bisnis.

Peran UMKM sendiri dalam masyarakat sangat luas. UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, merupakan pondasi ekonomi sosialis. Gerakan ekonomi yang berasal dari bawah ini diyakini lebih mampu bertahan terhadap guncangan krisis dibanding usaha besar. Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) dinilai mampu bertahan dari guncangan ekonomi dan menjadi penyelamat bagi perekonomian pada krisis keuangan 1998 dan krisis global 2008. Seperti halnya dalam pandemi *covid 19* ini, banyak perusahaan tutup dan sebagian mem-PHK karyawan mereka demi menyelamatkan perusahaan. Tetapi, banyak UMKM bermunculan dan menyerap tenaga kerja. Pasca krisis moneter, UMKM berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terbukti bahwa kemajuan perekonomian Indonesia peranannya dipegang oleh pelaku UMKM. Badria dan Diana (2018).

Keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah tersebut. Kontribusi yang diberikan oleh pelaku UMKM pada kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemulihan perekonomian nasional, dipandang dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesempatan kerja (Putra and Saskara, 2013). Peran UMKM dalam tata perekonomian nasional sudah tidak

diragukan lagi, dengan melihat kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional. Pada 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pelaku UMKM dan usaha besar sebanyak 64,2 juta. Terdiri atas pelaku usaha mikro 63,4 juta (98,68 persen), pelaku usaha kecil 783.132 (1,22 persen), pelaku usaha menengah 60.702 (0,09 persen), dan pelaku usaha besar 5.550 (0,01 persen). Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, UMKM memberikan kontribusi 97 persen. Sisanya korporasi 3 persen. UMKM menyumbangkan Rp 8.952,8 triliun (60,34 persen) terhadap total PDB nasional Rp 14.837,4 triliun dan memberikan kontribusi Rp 293,84 triliun (14,37 persen) terhadap total ekspor nonmigas Rp 2.044,49 triliun. Sementara investasi di sektor UMKM mencapai Rp 2.564,54 triliun (60,42 persen) dari nilai total Rp 4.244,68 triliun.

Namun, di tengah kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi tantangan yang kompleks. Misalnya produksi yang tidak efisien, terbatasnya akses ke lembaga keuangan khususnya perbankan, manajemen usaha yang lemah, kualitas SDM yang buruk, serta kurangnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Perkembangan UMKM yang pesat berdampak pada kompetisi yang semakin meningkat. Kompetisi yang semakin ketat cenderung menyebabkan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh mengarah pada kondisi dimana pengeluaran untuk keperluan produksi sama dengan pendapatan yang diperoleh. Bahkan pada kondisi tertentu, industri kecil yang tidak mampu berkompetisi akan tergusur dari persaingan usaha. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2015) terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Pertama, permasalahan yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Kedua, permasalahan yang terkait dengan permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi dan keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa dalam UMKM. Tantangan terbesar bagi UMKM adalah pengelolaan keuangan yang efektif baik untuk menjalankan organisasi serta

untuk kegiatan ekspansi dalam pertimbangan persaingan global (Zhang and Ye, 2010).

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Falah Rafiq. 2018). Hal ini juga bisa digunakan untuk menilai keadaan suatu usaha. Namun seperti yang dijabarkan, praktek akuntansi keuangan pada UMKM masih tergolong rendah dan memiliki banyak kelemahan. Seperti yang dikemukakan Ita Prawesti (2017) bahwa aktivitas akuntansi menyediakan Informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, sehingga dapat melakukan pengembangan usaha. Informasi yang didapat dari aktivitas akuntansi dapat digunakan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi dan memprediksi permasalahan yang akan timbul. Tanpa informasi akuntansi, masalah-masalah yang sedianya dapat dihindari justru bisa menjadi penyebab kegagalan usaha itu sendiri.

Semakin berkembangnya suatu usaha, menuntut pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Misalnya dalam hal peningkatan pendanaan, pihak UMKM akan berhubungan dengan pihak investor, bank atau lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, biasanya pihak tersebut akan menilai keadaan dari sisi pelaporan keuangan UMKM itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah ("ED SAK EMKM") dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 yang selanjutnya disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018, dengan penerapan lebih awal dianjurkan. SAK EMKM memiliki tujuan untuk standarisasi laporan keuangan UMKM. Laporan keuangan menurut SAK EMKM (2016) merupakan penyederhanaan dari

SAK sebelumnya yang ditujukan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan atau pihak investor. Kedepannya, SAK EMKM ini juga diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Karena, harapan dari penerbitan SAK EMKM ini adalah untuk membantu dalam pengembangan UMKM di Indonesia, maka seharusnya SAK EMKM ini diimplementasikan secara optimal. Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mengetahui adanya SAK EMKM ini sehingga belum dilaksanakan dengan optimal. Salah satunya yaitu di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1.1

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	PENGUSAHA			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MARGOMULYO	975	132	7	1,114
2	NGRAHO	2,795	187	13	2,995
3	TAMBAKREJO	3,759	223	14	3,996
4	NGAMBON	340	39	6	385
5	SEKAR	515	61	5	581
6	BUBULAN	654	87	8	749
7	GONDANG	679	71	12	762
8	TEMAYANG	1,661	298	15	1,974
9	SUGIHWARAS	2,467	419	42	2,928
10	KEDUNGADEM	2,974	459	66	3,499
11	KEPOH BARU	2,384	279	31	2,694
12	BAURENO	3,922	638	77	4,637

13	KANOR	4,258	278	26	4,562
14	SUMBEREJO	4,996	658	72	5,726
15	BALEN	4,208	495	59	4,762
16	SUKOSEWU	1,649	197	46	1,892
17	KAPAS	3,056	279	45	3,380
18	BOJONEGORO	8,932	1,456	218	10,606
19	TRUCUK	1,563	245	8	1,816
20	DANDER	3,781	363	38	4,182
21	NGASEM	1,479	121	10	1,610
22	GAYAM	867	94	15	976
23	KALITIDU	3,858	532	75	4,465
24	MALO	1,381	217	13	1,611
25	PURWOSARI	1,408	161	10	1,579
26	PADANGAN	3,126	297	26	3,449
27	KASIMAN	1,525	151	13	1,689
28	KEDEWAN	407	75	4	486
	Jumlah	69,619	8,512	974	79,105

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro, tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bojonegoro mencapai 79.105 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan. Serta pelaku UMKM tertinggi berada di Kecamatan Kota Bojonegoro yaitu sebanyak 10.606 pelaku UMKM pada tahun 2020. Melihat banyaknya jumlah UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, maka sudah seharusnya para pelaku UMKM memahami dan melaksanakan pemberlakuan standar pelaporan keuangan yang berlaku yaitu SAK EMKM guna menunjang usahanya.

Menurut data Dinkopum Kabupaten Bojonegoro (2020), dimana dalam setiap tahun terdapat beberapa kali program kerja yaitu melaksanakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk pengembangan UMKM. Seperti pelatihan keterampilan usaha, sosialisasi pembuatan laporan keuangan, pembinaan terhadap UMKM, dll. Khususnya dalam pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk UMKM sendiri, yang terjadi dilapangan masih banyak pelaku usaha yang hanya membuat pelaporan keuangan sebatas mencatat penjualan dan pembelian, bahkan masih banyak juga yang tidak membuatnya. Seperti para pelaku usaha mikro, mereka menganggap bahwa manajemen keuangan masih belum terlalu penting karena kecilnya omset

yang dihasilkan, sehingga menganggap belum memerlukan pelaporan keuangan. Faktor lain penyebab masih banyaknya pelaku usaha yang masih belum membuat laporan keuangan adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan lemahnya pengetahuan atau sumber daya manusia yang masih lemah. Seperti hasil penelitian dari Becti Kumalasari & Nadia Asandimitra (2019) yang menyatakan UMKM di Kabupaten Bojonegoro untuk lebih ditingkatkan kembali pengetahuan atau pemahaman mengenai pentingnya permodalan dalam usaha dengan cara mengikuti kegiatan *workshop* atau pelatihan mengenai modal usaha, agar pelaku UMKM lebih baik lagi dalam mengelola usahanya agar dapat berkembang dalam jangka panjang. Para pelaku UMKM merasa masih kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku, karena kurangnya sosialisasi atau pelatihan pembuatan laporan keuangan untuk UMKM dari pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan berita yang termuat di surat kabar radarbojonegoro.jawapos.com pada 11 september 2019, dinyatakan bahwa beberapa pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM daerah merasa kurang tersentuh oleh dinas terkait dengan sosialisai pelatihan manajemen keuangan. Karena mereka merasa memenejemen keuangan sangat diperlukan agar pelaku umkm terus ada dan produk atau jasa berkelanjutan, serta modal yang tidak terkontrol bisa menyebabkan produksi terhenti.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Penerapan SAK EMKM dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus UMKM di Wilayah Kabupaten Bojonegoro)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan SAK EMKM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara penerapan SAK EMKM dengan kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara penerapan SAK EMKM dengan kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan UMKM di Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi pengusaha UMKM penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran tentang kualitas laporan keuangan dan penerapan SAK EMKM untuk laporan

keuangannya, serta informasi dalam pengambilan keputusan untuk memajukan usahanya.

2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan standar akuntansi dan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan acuan referensi tentang penerapan SAK EMKM dan kualitas laporan keuangan UMKM dalam proses pengambilan keputusan.